

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Tahapan perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan memiliki delapan tahapan, Sebagian tahapan sudah berjalan secara maksimal dan masih ada yang belum maksimal. Tahapan yang belum maksimal diantaranya analisis lingkungan eksternal pada faktor sosial. Ditunjukkan dengan parameter bahwa Dinas Perhubungan belum mampu menghimbau masyarakat dan petugas parkir untuk meminta dan memberi karcis parkir. Kemudian faktor teknologi dengan pengembangan pemungutan retribusi melalui e-retribusi. Ditunjukkan dengan parameter setoran sudah dilkauan melalui e-retribusi dimana koordinator parkir membuat id billing untuk memasukan pendapatan harian dan disetorkan langsung ke Bank Jateng. Tahapan perencanaan strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam hal memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategi dengan koordinasi kepada penyedia ruang parkir dan koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan secara maksimal. Ditunjukkan dengan parameter adanya lokasi parkir di tepi jalan umum dan khusus tempat parkir di Kabupaten purworejo kemudian koordinasi dilakukan secara dua arah dengan melakukan rapat untuk pengambilan keputusan.

Strategi pengelolaan perparkiran dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, peregerakan, dan pengawasan. Proses strategi pengelolaan perparkiran yang dilakukan masih ada yang belum maksimal dan sudah dilakukan secara maksimal. Perencanaan dengan melakukan pengembangan lokasi titik parkir di tempat baru. Ditunjukkan dengan parameter lokasi parkir

memiliki 7 rayon dan setiap pengembangan lokasi parkir dilakukan bersama akademisi yaitu Universitas Jenderal Soedirman. Sehingga potensi yang diperoleh mampu mengurangi parkir ilegal, dan sudah dilakukan secara maksimal. Pengorganisasian dengan pembagian kerja untuk petugas parkir dalam penanganan untuk memperkirakan pendapatan harian rata-rata. Ditunjukkan dengan parameter *monitoring* pendapatan di lapangan kepada petugas parkir dan evaluasi kontrol untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan. Potensi yang diperoleh dari strategi ini mampu meningkatkan target pendapatan harian parkir yang masuk dalam pendapatan asli daerah, sehingga dalam strategi ini sudah berjalan secara maksimal dan mampu mencapai tujuan. Pergerakan untuk mengelola SDM dengan melakukan penggantian petugas parkir yang tidak melaksanakan ketentuan tugas yang berlaku. Ditunjukkan dengan parameter Dinas Perhubungan dan petugas parkir memiliki surat perjanjian terkait kesanggupan untuk target pendapatan. Potensi yang diperoleh dalam strategi ini petugas bekerja secara bertanggung jawab dan melaksanakan peraturan yang berlaku, dalam hal ini sudah berjalan secara maksimal. Pengawasan dengan mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kepada petugas parkir dan koordinator parkir. Ditunjukkan dengan parameter bahwa petugas parkir masih memiliki SDM yang rendah maka dilakukan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bersama Tim Kepolisian dan Satpol PP. Potensi yang diperoleh dari strategi ini mampu melaksanakan pengawasan secara dua arah melalui monitoring di lapangan dan melalui media sosial, dalam hal ini pengawasan sudah dilakukan secara maksimal.

## 4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat diberikan saran kepada pengelolaan perparkiran supaya kedepannya lebih baik:

1. Dinas Perhubungan perlu mengawasi proses pemberian karcis parkir yang telah difasilitasi Dinas Perhubungan kepada petugas parkir, karena masih ada petugas parkir yang menyalahgunakan keberadaan karcis parkir tersebut.
2. Dinas Perhubungan pada kawasan tertentu harus beralih ke parkir elektronik sehingga perlu melakukan pelatihan kepada pegawai untuk memberikan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi supaya memudahkan dalam melaksanakan pekerjaannya dan meningkatkan kualitas sumber daya pegawai yang dimiliki. Supaya menciptakan pegawai yang kompeten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Kemudian untuk sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dan dikaji supaya badan jalan tidak terganggu dan tidak menyebabkan kemacetan, sehingga Kabupaten purworejo tidak semrawut yang disebabkan oleh perparkiran
4. Dinas Perhubungan harus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan perparkiran, karena masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir juga harus memiliki kesadaran untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.